

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia sekitar 2/3 wilayahnya terdiri atas laut sehingga Indonesia disebut sebagai Negara Maritim.¹ Dengan luas wilayah serta letak geografis Indonesia yang strategis, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia kaya akan Sumber Daya Laut yang berpotensi terutama dalam sektor perikanan.

Sulawesi Selatan sendiri merupakan salah satu daerah yang memiliki garis pantai yang cukup panjang di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang sesuai dengan letak geografisnya dikelilingi oleh laut sehingga masyarakatnya terutama yang bermukim dipesisir pantai memanfaatkan lingkungan alam sekitar.² Bentuk Pulau Sulawesi menyerupai huruf “K” sehingga memiliki empat jazirah dan tiga teluk. Antara jazirah selatan dan jazirah tenggara terdapat Teluk Bone; antara jazirah tenggara dan jazirah barat laut terdapat Teluk Tomini; dan antara jazirah barat laut dan jazirah utara terdapat Teluk Tomini atau Teluk Gorontalo.³

Sulawesi Selatan memiliki areal perikanan cukup luas yaitu untuk budidaya air payau (tambak) 150.000 Ha, dengan produksi 20.000 ton/ha, budidaya dan penangkapan air tawar 100.000 Ha, produksi 20.000 ton/ha, perikanan pantai 3.700

¹ Resky Hidayah Nur dan Najamuddin. “*Perubahan Pola Kehidupan Nelayan Desa Galesong Baru Pasca Modernisasi, 1980-2015*”. Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, Vol 7. No.2, (Agustus 2020). Hlm. 184.

² *Ibid.*

³ Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002). Hlm. 12

mil dengan produksi 100.000 ton/mil dan perikanan lepas pantai 73.450 mil dengan produksi 200.000 ton/mil.⁴

Khusus untuk tambak saat ini sudah dapat dianekaragamkan budidayanya, mulai dari ikan bandeng, udang, kepiting, hingga rumput laut. Sementara untuk perairan umum dan budidaya air tawar meskipun potensi pendapatannya memungkinkan, akan tetapi terkendala untuk peningkatan produksinya, misalnya pada saat musim penghujan airnya akan meluap. Masyarakat nelayan di pesisir Sulawesi Selatan masih tetap menggunakan sistem penangkapan ikan dengan sistem tradisional.⁵

Pada tahun 1989 Sulawesi Selatan memiliki 28 unit TPI dengan sarana armada perikanan sebanyak 26.131 buah, kapal motor 1.488 buah, motor tempel 6.191 buah, perahu motor tempel 18.452 buah, alat tangkap ikan 31.674 unit, jaring 18.169 unit pancing 10.113 unit, perangkap 2.856 unit dan alat lain 535.⁶

Makassar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak dipesisir pantai serta memiliki potensi yang cukup menjanjikan dalam sektor perikanan. Kata “Makassar” selalu digunakan untuk menerangkan kata yang mendahuluinya, seperti orang Makassar, Tanah Makassar, Kerajaan Makassar dan Kota Pelabuhan Makassar. Orang Makassar adalah salah satu kelompok etnis yang bermukim di wilayah pesisir barat dan Selatan Sulawesi bagian selatan.⁷ Makassar

⁴ Koran Harian Neraca, 5 Januari 1989. Hlm. V.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002). Hlm. 12

terletak di pesisir Pantai Barat Sulawesi Selatan yang di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan disebelah barat berbatasan dengan Selat Makasar. Makassar merupakan kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan potensi perikanan yang cukup menjanjikan.

Sektor Perikanan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting dalam pembangunan serta meningkatkan Devisa Negara. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu retribusi. Pemerintah Daerah dituntut menghidupi dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang di miliki, untuk itu usaha mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan.⁸

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha Pemerintah Daerah menyediakan prasarana, sarana/fasilitas dan mengelolah Pelelangan Ikan.⁹ Dengan potensi perikanan yang dimiliki Makassar, maka di bangun pelabuhan perikanan sebagai salah satu faktor utama pendukung usaha perikanan.

Salah satu pelabuhan perikanan yang cukup besar di Kota Makassar adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere yang berfungsi sebagai pelabuhan

⁸ Rahmi Yustianingsih. *“Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Terhadap Hak dan Kewajiban Pedagang di Pelelangan Ikan Paotere”*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar 2022.

⁹ <http://jdih.bangkabaratkab.go.id> (Diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 13:12 WITA).

bongkar muat barang dan hasil-hasil perikanan.¹⁰ Salah satu fasilitas yang terdapat di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere sebagai sarana pengembangan produksi. Pengolahan maupun pemasaran hasil perikanan.

Tempat Pelelangan Ikan Paotere merupakan pelabuhan perikanan yang memadukan antara wilayah daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan ikan yang dilengkapi dengan fasilitas sejak ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan (Lubis dalam Patangari, 2011:4). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Makassar terpola berdasarkan konsentrasi para nelayan.¹¹ Keberadaan tempat pelelangan ikan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal.¹²

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere terletak di Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Kelurahan Gusung merupakan dataran rendah dengan luas wilayah 10 ha/m².¹³ Dengan letak wilayahnya yang berada di

¹⁰ Andi Tenri Fada, Muhammad Kurnia dan Achmar Mallawa. “*Kinerja Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere Kota Makassar*”. Jurnal Torani Volume 4 (2) Juni 2021. Hlm. 111.

¹¹ A Muhaimin Patangari. “*Perkembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere 1950-1960*” (Makassar: Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. 2011). Hlm. 3.

¹² Suwaib Amiruddin, “*Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagai Sarana Pelayanan Publik*”. MIMBAR, Vol. 30, No.2 (Desember, 2014). Hlm. 253-261.

¹³ Iriani. “*Aktivitas Nelayan di Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar*”. Jurnal Walasuji Volume 8, No. 1 (Juni 2017). Hlm. 48.

pesisir pantai, penduduk Kelurahan Gusung memanfaatkan lingkungan sekitar dengan menjadikan laut sebagai sumber mata pencaharian mereka, hal tersebut dapat dilihat dengan sebagian besar penduduk Kelurahan Gusung, hampir sebagian besar bekerja sebagai nelayan hasil perikanan di Kelurahan Gusung dapat dikatakan sangat potensial untuk perkembangan ekonomi masyarakatnya. Ada alternatif masyarakat dalam memproduksi hasil perikanan, yakni (1) penangkapan langsung dilaut lepas dengan menggunakan alat pancing dan pukat, dan (2) pengolahan ikan.¹⁴ Selain itu, terdapat komponen didalamnya mulai dari para nelayan (punggawan laut dan sawi), punggawan darat, pabissa dan pemikul ikan, pedagang, tukang kredit, para konsumen, pemerintah dan lain sebagainya.¹⁵

Pada tahun 1950-an, kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere sangat memprihatinkan baik dari segi bangunan, kebersihan pelelangan, kantor maupun fasilitas. Hal tersebut sangat penting bagi sebuah pelelangan karena dapat mempengaruhi pendapatan sebuah pelelangan itu sendiri. Selain itu, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere juga sering menghadapi masalah yang cukup serius yang menjadi salah satu penyebab kurangnya pemasukan di pelelangan. Salah satu masalah yang sering terjadi di Pelelangan Ikan Paotere yaitu terjadinya kekacauan-kekacauan serta pelanggaran di Pelelangan yang disebabkan oleh beberapa oknum baik yang disengaja maupun tidak.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, Penulis tertarik untuk menulis lebih lanjut mengenai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere, karena di tempat

¹⁴ *Op. Cit.* Iriani. Hlm. 21.

¹⁵ *Op. Cit.* A Muhaimin Patangari. Hlm. 7.

pelelangan ikan terdapat aktivitas yang dilakukan oleh Nelayan maupun pedagang ikan dalam proses pelelangan ikan.

1.2. Batasan Masalah

Dalam penelitian, terdapat dua batasan masalah yaitu batasan temporal dan spasial. Batasan temporal dimulai pada tahun 1952, dimana pada tahun tersebut kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere masih sangat memprihatinkan, baik dari segi bangunan maupun pendapatan. Kemudian dibatasi dengan tahun 1992, penulis memilih tahun 1992 karena pada tahun tersebut TPI Paotere mulai direnovasi secara bertahap dan dari segi fasilitas sudah terdapat alat pendingin ikan di TPI. Sedangkan untuk batas spasial, penulis membatasi pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere pada tahun 1952-1992?
2. Bagaimana aktivitas jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere pada tahun 1952-1992.

- 2) Untuk mengetahui Bagaimana aktivitas jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Menambah referensi mengenai bagaimana kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere pada tahun 1952-1992.
- b. Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk peneliti yang akan mengkaji mengenai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere.

1.6. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan aktivitas meninjau kembali berbagai literatur, kajian maupun penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

1.6.1. Penelitian yang Relevan

Buku yang buku yang berjudul *Antara Bekerja dan Sekolah (Kasus Anak-Anak di TPI Paotere Makassar)* oleh Iriani yang menjelaskan bahwa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere memiliki peran penting terhadap kehidupan masyarakat sekitar terutama masyarakat di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Makassar yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai Nelayan yang penghasilannya bergantung pada kondisi ekonomi yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere.¹⁶

¹⁶ Iriani, 2016. *Antara Bekerja dan Sekolah (Kasus Anak-Anak di TPI Paotere Makassar)*. Makassar: Arus Timur.

Buku *Peran Terhadap Masyarakat: Pasar Ikan di Pangkep* yang ditulis oleh Joni Lisungan. Dalam Buku ini menjelaskan tentang kehidupan para nelayan serta fasilitas-fasilitas yang ada dipasar ikan Pangkep. Selain itu, dijelaskan juga bahwa pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat melakukan transaksi jual beli ikan seperti layaknya pasar ikan yang ada dilokasi lain, namun juga memiliki peran sebagai tempat Pelelangan ikan. Meskipun sebenarnya Pangkep memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tersendiri.¹⁷

Buku *Ponggawa-Sawi Lembaga Ekonomi Nelayan Tradisional Makassar* yang ditulis oleh Raodah. Buku ini menjelaskan mengenai tentang kehidupan masyarakat nelayan yang ada di Galesong. Selain itu juga membahas mengenai Tempat Pelelangan Ikan Beba yang ada di Galesong.¹⁸

Suriadi Mappangara, *Paotere Sebuah Kisah Tempat Pelelangan Ikan* yang menjelaskan tentang unsur-unsur yang terlibat dalam organisasi pemasaran di TPI Paotere dan kondisi TPI Paotere sebelum dan sesudah dikelola oleh pihak swasta.¹⁹

Skripsi *Perkembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere 1950-1960* yang ditulis oleh A Muhaimin Patangari yang menjelaskan bahwa pada tahun 1950 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere mulai

¹⁷ Joni Lisungan, *Peran Terhadap Masyarakat: Pasar Ikan di Pangkep*

¹⁸ Raodah, 2004. *Ponggawa-Sawi Lembaga Ekonomi Nelayan Tradisional Makassar*. Makassar: De La Macca.

¹⁹ Muklis (Editor), *Persepsi Sejarah Kawasan Kota Pantai*. Suriadi Mappangara, *Paotere Sebuah Tempat Pelelangan Ikan*, (P3MP, Universitas Hasanuddin, Makassar: 1989).

berkembang. Selain itu dijelaskan juga bahwa pada tahun 1950 s/d 1951 kegiatan perikanan di Dermaga Perikanan Paotere masih dikelola oleh Organisasi-organisasi nelayan Tradisional. Dijelaskan juga bahwa pada tahun 1953 selain menjadi pusat pelelangan ikan, pada tahun tersebut menjadi awal munculnya masalah baru yang terjadi di pelelangan.²⁰

Meskipun dalam penelitian ini, terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh A. Muhaimin Patangari baik dari lokasi penelitian maupun kurun waktu penelitian yang hampir sama. Akan tetapi terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu pada penggunaan sumber buku maupun arsip yang masih kurang. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada bagian Perkembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere, penelitian sebelumnya hanya menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk wilayah Kampung Gusung Ujung Tanah Makassar sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan, akan tetapi tidak memiliki data secara detail jumlah Nelayan yang ada di Kampung Gusung Kecamatan Ujung Tanah Makassar. Pada bagian kondisi Tempat Pelelangan Ikan Paotere tahun 1950-1960 tidak dijelaskan secara detail mengenai kondisi bangunan pelelangan serta dampak keberadaan pelelangan yang berada ditengah-tengah pemukiman penduduk yang menjadi salah satu alasan Tempat Pelelangan

²⁰ A Muhaimin Patangari. 2011. “Perkembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere 1950-1960”. Makassar: Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Ikan (TPI) Paotere dipindahkan. Selain itu, pada bagian peran Pemerintah Kota Makassar dijelaskan bahwa pada tahun 1954 pemerintah mengeluarkan aturan dalam pelaksanaan lelang ikan dengan menerbitkan surat kepada aparat hukum atau Kepolisian agar turut mengawasi jalannya pelelangan Ikan di Paotere. Akan tetapi, pada tahun 1952 pihak Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere telah melakukan pengawasan di Pelelangan serta menindak lanjuti laporan-laporan mengenai kekacauan atau masalah yang terjadi dipelelangan.

Penelitian sebelumnya tidak memiliki data mengenai pendapatan Pelelangan Ikan Paotere sebelum dan sesudah dilakukannya pengawasan, jadwal pengawasan, serta daftar nama-nama Punggawa di Pelelangan Ikan Paotere. Selain itu, pada penelitian sebelumnya tidak terdapat penjelasan mengenai penarikan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere meskipun terdapat penjelasan yang mengatakan bahwa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

1.7. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan sebuah metode penelitian sejarah dalam mendapatkan data mengenai peristiwa yang akan dikaji. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu: Pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi

(kritik sejarah, keabsahan sumber, interpretasi: analisis dan sintesis dan penulisan.²¹

1.7.1 Pemilihan Topik

Pemilihan Topik merupakan langkah awal dalam penulisan sejarah yang didasarkan pada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Pemilihan topik penting dilakukan agar penulis lebih fokus dan terarah dengan masalah yang sesuai dengan topik yang telah dipilih.

1.7.2 Pengumpulan sumber

Setelah memilih topik, langkah selanjutnya yaitu pengumpulan sumber. Pengumpulan Sumber merupakan tahap pencarian serta pengumpulan sumber-sumber mengenai masalah yang akan diteliti baik sumber primer maupun sekunder.

Dalam pengumpulan sumber, penulis mengumpulkan sumber Primer berupa Arsip di Kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Arsip yang penulis temukan di Kantor Arsip yaitu *Nomor Reg 1170 Surat Keputusan Nomor 100/C/V/65 tanggal 16 September 1965 mengenai penyerahan Pelelangan Ikan Kampung Baru, Nomor Reg 523 tentang Surat Perintah No.3/D. P/ VIII/ 73 untuk mengadakan penaksiram dan menagih retribusi, Nomor Reg 604 tentang perubahan batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1971, Nomor*

²¹ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka :1995). Hlm. 90.

Reg 609 Surat Keputusan Nomor 2667 A tanggal 19 Desember 1961 tentang pembubaran distrik bentukan lama dan membentuk struktur Pemerintahan baru yang disebut Kecamatan, *Nomor Reg 1808*, tentang Daftar Keadaan Penduduk Kotamadya Makassar Akhir Bulan Desember 1966, *Nomor Reg 1179* Laporan Triwulan III Perikanan Laut Kotamadya Makassar pada tanggal 4 Agustus 1966: pendirian perusahaan daerah “Perikanan” Kotamadya Makassar, *Nomor Reg 590* mengenai Daftar Luas Wilayah Administratif Kecamatan-Kecamatan di Kotamadya Makassar Pada Tahun 1969, *Nomor Reg 1820* tentang Data Kependudukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Ujung Pandang 1971-1977. *Nomor Reg 577* tentang pendapatan rutin Daerah, *Nomor Reg 232* Perihal anak-anak pasar yang menginap di pelelangan dan mengadakan kekacauan; pencurian ikan dan pelanggaran peraturan Pelelangan Ikan: Daftar Nama-Nama Punggawa Ikan dan Punggawa Klontong di Pelelangan Ikan Kampung Baru pada tanggal 22 Juli 1954. *Nomor Reg 1178* tentang Daftar harga dan jenis ikan yang masuk di Pelelangan Ikan Kampung Baru Kota Makassar pada tanggal 1 s/d 15 November 1960: Daftar nama Pulau dan Kampung yang memasukkan ikan di Pelelangan Ikan Kampung Baru pada tanggal 1 s/d 30 November 1960, *Nomor Reg 576* perihal laporan tahunan untuk tahun 1967 dan rencana kerja untuk tahun 1968 Pemerintah Daerah Kotamadya Makassar dikemukakan oleh Walikota Kepala Daerah Makassar, Major M.Daeng Patompo dalam sidang Paripurna DPRD Kotamadya Makassar tgl 23 Januari 1968, *Nomor Reg 1813* tentang daftar penduduk tiap-tiap Lingkungan, Kecamatan Kotamadya

Ujung Pandang menurut keadaan permulaan tahun 1973, *Nomor Reg 131* tentang Keadaan Tanah di Jalan Gusung pada Tahun 1952: Laporan keadaan gedung pelelangan dan usul untuk mendirikan gedung yang baru pada 19 Agustus 1952.

Untuk sumber sekunder, penulis mengumpulkan data dari beberapa buku-buku, koran, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, serta jurnal yang didapat di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Fakultas Sastra, Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Perpustakaan Abdurrasyid Dg Lurang.

1.7.3 Verifikasi atau kritik sumber

Pada tahap ini, sumber yang telah dikumpulkan akan diuji keabsahannya. Pada tahap, kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik Intern. Kritik ekstern yaitu kritik terhadap keaslian dari sumber-sumber. Sedangkan Kritik Intern yaitu kritik mengenai kebenaran dari isi dan informasi dari sumber yang telah didapat. Kritik Ekstern dan kritik intern berfungsi untuk menyeleksi atau menyaring sumber-sumber yang telah didapat.

1.7.4 Interpretasi atau penafsiran

Pada tahap ini, dilakukan penafsiran terhadap sumber atau data yang telah diseleksi atau disaring pada tahap sebelumnya kemudian disusun untuk menghasilkan sebuah fakta-fakta sejarah.

1.7.5 Penulisan sejarah atau Historiografi

Penulisan sejarah atau Historiografi merupakan tahap terakhir dari rangkaian penelitian. Pada tahap ini, semua data atau fakta sejarah yang telah diperoleh dirangkai secara sistematis menjadi sebuah tulisan sejarah.

1.8. Sistematika Penulisan

Bab I, sebagai bab pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, berisi tentang gambaran umum mengenai Kota Makassar dari segi geografis, sosial ekonomi dan budaya khususnya masyarakat pesisir Kota Makassar.

Bab III, membahas mengenai kondisi serta fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere pada tahun 1952-1992.

Bab IV, berisi tentang aktivitas jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere serta jenis-jenis ikan yang dijual di TPI Paotere.

Bab V, berisi kesimpulan secara keseluruhan mulai dari Bab I sampai Bab V sekaligus bab penutup dalam penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA MAKASSAR

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Kota Makassar yang meliputi kondisi geografis Kota Makassar, keadaan sosial, serta ekonomi masyarakat pesisir Kota Makassar. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Makassar.

2.1 Kondisi Geografis Kota Makassar

Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan pusat segala kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga sebagai Kota Pelabuhan yang sangat penting dibagian Timur Indonesia.²² Sebagai salah satu kota pesisir yang ada di Indonesia, Kota Makassar memiliki garis pantai sepanjang 32 km dan mencakup 11 pulau-pulau kecil dengan luas keseluruhan mencapai 122.370 Ha atau 1,1% dari luas wilayah daratannya.²³ Kota Makassar diapit oleh dua sungai yaitu Sungai Tallo yang bermuara disebelah utara Kota Makassar dan Sungai Jeneberang yang bermuara di bagian selatan Kota Makassar, serta sejumlah aliran sungai lain seperti Sungai Sanrobone dan Sungai Kacia.²⁴

Batas-batas wilayah Kota Makassar:

²² Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988) Vol.1*. No. Reg 604 tentang perubahan batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1971.

²³ Yuliani Suleman, dkk.” *Tinjauan Degradasi Lingkungan Pesisir dan Laut Kota Makassar Terhadap Kebijakan Pengolahan Kawasan Pesisir*”. Jurnal SENSISTEK: Riset Sains dan Teknologi Kelautan, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2018. Hlm Hlm. 26.

²⁴ Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002). Hlm. 14.

- 1) Disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkajene.
- 2) Disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa.
- 3) Disebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.
- 4) Disebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Jawa.

Di bagian barat pelabuhan terdapat sejumlah pulau kecil, gugusan pulau yang dikenal sebagai Kepulauan Spermonde. Kepulauan ini secara alami merupakan pelindung dan penghalang gelombang laut dan badai muson barat.²⁵

Makassar berada pada daerah khatulistiwa yang terletak di pesisir pantai Selat Makassar, maka suhu udara berkisar antara 20° C - 36° C, curah hujan antara 2.000 - 3.000 mm, dan jumlah hari hujan rata-rata 108 hari pertahun.

Iklim di Makassar hanya mengenal dua musim sebagaimana wilayah Indonesia lainnya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan Oktober sampai April yang dipengaruhi muson barat, dalam Bahasa Makassar disebut *bara'*, dan musim kemarau berlangsung dari bulan Mei sampai dengan September yang dipengaruhi angin muson timur, dalam Bahasa Makassar disebut *timoro'*.²⁶

Pada tahun 1961 berdasarkan Surat Keputusan No.2667 A Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara membubarkan seluruh distrik

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Kotamadya Ujung Pandang Vol. 2 (1951-1987). Hlm. iii – iv.

bentukan lama dalam Daerah tingkat II Makassar yang terdiri dari Muna, Kendari, Kolaka, Pinrang, Gowa, Wajo, Makasaar, Mamuju, Bone, Tanah Toraja, Maros, Pare-Pare, Majene dan Luwu. Dari pembubaran tersebut, dibentuk struktur Pemerintahan baru yang disebut Kecamatan²⁷. Makassar terdiri dari 8 Kecamatan yaitu:

1. Ujung tanah dengan tempat kedudukannya di Tabaringan, terdiri dari 4 Lingkungan yaitu Ujung Tanah, Gusung, Pattingalloang dan Tabaringan.
2. Tello dengan tempat kedudukannya di Kalukubodoa, terdiri dari 8 Lingkungan yaitu Tallo, Pannampu, Cambaya, Kalukuang, Rappojawa, Kalukubodoa dan Lakkang.
3. Wajo dengan tempat kedudukannya di Butung, terdiri dari 4 Lingkungan yaitu Butung, Kampung Melayu, Pattunuang dan Malimongan tua.
4. Bontoala dengan tempat kedudukannya di Wajo Baru, terdiri dari 7 Lingkungan yaitu Malimongan baru, Layang, Baraya, Bontoala, Wajo baru, Parang Layang dan Gaddong.
5. Mariso dengan tempat kedudukannya di Mariso, terdiri dari 6 Lingkungan yaitu Mattoangin, Bontorannu, Pannambungan, Lette, Kunjung Mae dan Mariso.

²⁷ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988) Volume 1*. No. Reg 609, Surat Keputusan Nomor 2667 A tanggal 19 Desember 1961 tentang pembubaran distrik bentukan lama dan membentuk struktur Pemerintahan baru yang disebut Kecamatan.

6. Mamajang dengan tempat kedudukannya di Mamajang Luar, terdiri dari 5 Lingkungan yaitu Maricaya Selatan, Mamajang dalam, Mamajang luar, Parang dan Sambung Nyawa.
7. Ujung pandang dengan tempat kedudukannya di Mangkura, terdiri dari 5 Lingkungan yaitu Mangkura, Maluku baru, Pisang Selatan dan Pisang Utara.
8. Makassar dengan tempat kedudukannya di Maradekaya, terdiri dari 5 Lingkungan yaitu Maccini, Lariangbangngi, Maradekaya, Bara baraya dan Maricaya.

Secara keseluruhan Makassar terdiri dari 44 lingkungan, 261 RK dan 2.429 RT.²⁸

Pada masa pemerintahan Walikota H. M. Dg. Patompo (1965-1978), terjadi perubahan nama Kotamadya Makassar menjadi Kota Ujung Pandang pada tanggal 14 September 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1971. Selain itu, dilakukan perluasan Kota Makassar yang sebelumnya hanya memiliki luas wilayah 21 km² menjadi 175,7 km² ²⁹, terdiri dari 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan.

²⁸ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988) Vol.1*. No. Reg 590 tentang Lingkungan di setiap Kecamatan di Kota Makassar pada tahun 1968.

²⁹ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (1951-1987) Vol.2*. Hal.iii.

Kota Makassar berada pada koordinat antara 119° 18' 27,79"- 119° 32' 32,31,03" Bujur Timur dan antara 5° 3' 30,81" - 5° 14' 6.49" Lintang Selatan, atau berada pada bagian Barat Daya Pulau Sulawesi dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 0 – 25.

2.2 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Kota Makassar

Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu pusat kegiatan perekonomian hingga pembangunan. Berdasarkan sejarahnya, Kota Makassar yang dulunya menjadi pusat kerajaan Gowa-Tallo, telah mengalami perkembangan baik dari segi luas wilayahnya maupun penduduk serta mobilitasnya. Makassar menjadi penting di kawasan ini sejak awal abad 16 sampai menjelang berakhirnya paruh abad ke 17 dan menjadi pusat dan transit perdagangan di kawasan Timur Indonesia.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1952-1992

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK
1930	85.000 jiwa
1950	186.000 jiwa
1954	200.000 jiwa
1961	384.000 jiwa
1965	415.826 jiwa
1966	424.143 jiwa
1967	432.696 jiwa
1968	445.768 jiwa
1969	450,104 jiwa
1970	432.242 jiwa
1971	553.874 jiwa
1972	560.000 jiwa
1976	602.693 jiwa
1979	602.985 jiwa
1980	708.465 jiwa
1981	712.219 jiwa

1982	717.585 jiwa
1983	736.159 jiwa
1984	748.611 jiwa
1985	753.362 jiwa
1986	778.593 jiwa
1987	806.129 jiwa
1990	944.372 jiwa
1991	971.947 jiwa
1992	1.000.328 jiwa

Sumber: Trisna Rassing, 2019

Pertumbuhan penduduk Kota Makassar dipengaruhi oleh migrasi yang masuk ke Kota Makassar melalui dua gelombang dari tahun 1945-1970. Gelombang migran pertama terjadi antara 1945 hingga tahun 1950 dari berbagai daerah di Indonesia timur, sedangkan gelombang migran kedua masuk pada tahun 1950 hingga akhir tahun 1960-an dan mereka umumnya berasal dari daerah di Sulawesi Selatan sendiri. Arus masuk migran gelombang pertama lebih merupakan refleksi pentingnya posisi sosial politik Kota Makassar di daerah Indonesia bagian timur. Para migran gelombang kedua masuk untuk menghindari ketidakamanan dan ketidakpastian di daerah pedesaan Sulawesi Selatan bersamaan dengan meluasnya operasi militer, baik oleh TNI maupun oleh ‘gerombolan’. Migran gelombang kedua ini berjumlah lebih banyak dari migran gelombang pertama.³⁰

³⁰ Dias Pradadimara “*Dari Makassar ke Makassar: Aspek Demografi dan Politik Proses ”Etnisasi” Sebuah Kota*”. Jurnal Populasi, Vol. 14 No.1, 2003. Hlm. 86.

Tabel 2.2 Daftar Luas Wilayah Adminstratif Kecamatan-Kecamatan Kotamadya Makassar Tahun 1969

No	Kecamatan	Banyaknya lingkungan	Luas km2	Jumlah pendduk	Keterangan
1	Kecamatan tallo	8	3.48	37.864	Keadan sampai akhir tahun 1969
2	Kecamatan ujung tanah	4	1.5	26.872	
3	Kecamatan wajo	4	2.25	51.721	
4	Kecamtan bontoala	7	4.69	60.003	
5	Kecamatan makassar	5	3	78.087	
6	Kecamatan u.pandang	5	4	53.150	
7	Kecamatan mamajang	5	1.85	50.875	
8	Kecamatan mariso	6	3.5	44.786	
Jumlah	8 kecamatan	44	±24 km2	403.340	

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988) Volume 1*. No. Reg 590 tentang daftar luas wilayah administratif kecamatan-kecamatan Kotamadya Makassar.

Penduduk Kota Makassar saat ini sebagian besar terdiri dari orang Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, etnis lain di Nusantara serta keturunan Cina. Mereka umumnya berprofresi dibidang barang dan jasa, industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan serta bidang lainnya. Dengan penduduk yang sudah bervariasi tersebut diatas, mereka umumnya menggunakan Bahasa Indonesia dialek Makassar dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa Makassar, Bugis, Toraja dan

Mandar hanya dipakai dilingkungan rumah. Penutur Bahasa Makassar masih banyak dijumpai pada perkampungan yang didominasi oleh orang Makassar.³¹

Tabel 2.3 Daftar Jumlah Penduduk Setiap Kecamatan di Kotamadya Makassar Akhir Bulan Desember Tahun 1966

NO.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk tahun 1966					
		Jenis Kelamin		Agama/Kepercayaan			
		Pria	Wanita	Islam	Kristen	Budha	Tidak Beragama
1	Tallo	16448	18177	34062	563	-	-
2	Ujung Tanah	11916	11542	22934	312	212	-
3	Wajo	15768	15890	25543	2772	3343	-
4	Bontoala	31689	32123	52549	7415	2495	1353
5	Makassar	54949	42718	83823	11050	2794	-
6	Ujung Pandang	29291	29458	36923	14292	7518	16
7	Mamajang	25734	24683	44716	5314	387	-
8	Mariso	20638	18438	33047	5342	638	49

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventais Arsip Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988) Volume 1. Nomor Reg. 1808.

Berdasarkan data tabel diatas, jumlah penduduk yang menganut agama atau kepercayaan terbanyak selain agama islam yaitu kecamatan Ujung Pandang dengan jumlah penganut agama Kristen 14.292 dan agama Budha 7.518. Hal tersebut dipengaruhi oleh Benteng Ujung Pandang atau Benteng Rotterdam yang terletak di Kecamatan Ujung Pandang. Di Benteng Rotterdam banyak bermukim orang-orang

³¹ Andi Agus, dkk.” *Gambaran Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Sulawesi Selatan (Fieldwork)*”. Jurnal Penelitian TECHNO: Vol. 07 (01) Mei 2018. Hlm. 146.

asing seperti orang-orang Belanda, pedagang dari Eropa dan Tionghoa. Selain itu juga terdapat beberapa penduduk asli yang beragama Kristen.

Pengelompokan penduduk yang membentuk kehidupan sosial Kota Makassar mulai tampak pada akhir abad-17 yaitu sejak keberhasilan Belanda (VOC) menguasai daerah ini. Pengelompokan penduduk menurut kategori sosial-ekonomi dan sosio-kultural diantaranya: elemen pertama yaitu Fort Rotterdam menjadi pemukiman Belanda, elemen kedua tumbuh dan berkembang di sebelah timur Fort Rotterdam yang disebut sebagai “perkampungan pedagang” atau “*negory Vlaardingen*”, yang merupakan pemukiman bagi orang-orang asing termasuk etnis Tionghoa. Elemen ketiga adalah Kampung Melayu yang dihuni oleh orang-orang Melayu, pemukiman lain bagi orang-orang pribumi adalah kampung Baru yang bersebelahan di bagian Selatan Fort Rotterdam.³²

Kebanyakan orang hanya mengetahui dari peta Hindia Belanda bahwa Makassar sebuah pusat kota pelabuhan Wilayah Indonesia Timur. Tetapi selain itu diberbagai tempat dalam kota telah dibangun pasar dan rumah tempat tinggal para pejabat-pejabat penting Belanda. Ketika Makassar ditata sebagai kota niaga, para saudagar Melayu, Bugis, dan Makassar telah membangun tempat pemukiman yang disebut Kampung Melayu, lalu disebelah timur *Vlaardingen*, terdapat pemukiman orang-orang Wajo. Sementara disebelah utara Kampung Wajo, terdapat pemukiman orang-orang Cina yang disebut Kampung Cina.³³

³² Syahrudin Mansyur, “Konstruksi Baru Pameran Museum Kota Makassar”. Tesis (Depok: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 100-101.

³³ Rasyid Asba, 2007. “*Kopra Makassar Perbeutan Pusat dan Derah Kaian Searah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*”. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia). Hlm. 68.

Semakin meningkatnya perkembangan sosial ekonomi di Daerah Kotamadya Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Pelabuhan yang penting tidak mampu menampung segala keinginan masyarakat daerah tersebut khususnya dalam bidang pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan perluasan batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Pangkajene dan Kepulauan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1971.³⁴

Perubahan batas daerah

- 1) Daerah kotamadya makassar diperluas dengan memasukkan sebagian daerah dari:

- a. Kabupaten Gowa meliputi desa-desa:

1. Barombong
2. Karuwisi
3. Panaikang
4. Tello Baru
5. Antang
6. Tamangapa
7. Jongaya
8. Rappocini

³⁴ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988) Vol.1*. No. Reg 604. Tentang perubahan batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten– Kabupaten Gowa, Maros serta Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan.

9. Maccini Sombala

10. Mangasa

b. Kabupaten Maros meliputi desa-desa:

1. Bira

2. Daya

3. Tamalanrea

4. Bulurokeng

5. Sudiang

c. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi desa-desa:

1. Barrang Caddi

2. Barrang Lompo

3. Kodingareng.³⁵

Setelah dilakukan perluasan wilayah pada tahun 1971, Kota Makassar yang sebelumnya hanya terdiri dari 8 Kecamatan menjadi 11 Kecamatan yaitu Mariso, Ujung Tanah, Makassar, Ujung Pandang, Mamajang, Bontoala, Wajo, Tallo, Panakkukang, Tamalate dan Biringkanaya.³⁶

Penduduk pesisir Kota Makassar sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Dalam hal ini, mereka menggantungkan hidupnya pada hasil laut didaerah mereka,

³⁵ Ibid.

³⁶ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988) Vol.1*. No. Reg 1820, data tentang kependudukan dikotamadya Daerah Tingkat 2 Ujung Pandang 1971-1977.

khususnya dengan cara menangkap ikan di laut sekitar. Selain itu, sebagian ada yang memilih melakukan aktivitas perdagangan antar pulau di Sulawesi Selatan.³⁷



Gambar 2.1 Perahu Pinisi Bugis-Makassar di Pelabuhan Paotere Ujung Pandang

Sumber: Koran Pedoman Rakyat, 6 Januari 1985

Mereka menangkap ikan dengan perahu-perahu layar sampai jauh di laut. Orang Bugis Makassar sebagai suku bangsa laut di Nusantara ini telah mengembangkan suatu kebudayaan maritim sejak beberapa abad yang lalu. Sebagai suku bangsa pelaut, mereka telah mampu menciptakan teknologi pelayaran yang sesuai dengan alam lingkungan kelautan, ciptaan perahu layar yang terkenal seperti tipe ‘Phinisi’ dan ‘Lambo’ telah teruji kemampuannya mengarungi perairan Nusantara bahkan sampai ke Srilanka dan Filipina untuk “berniaga”. Kemampuan berlayar dan teknologi pelayaran dengan teknologi pelayaran yang dimiliki itu telah mendorong terciptanya hukum niaga dalam pelayaran, seperti “*Ade*

³⁷ Ahmad Faidi. 2014. “*Suku Makassar Penaga Keayaan Imperium*”. (Makassar: Arus Timur). Hlm. 67.

allowilayahloping Bicaranna Pabbalue” yang tertulis pada lontarak oleh Amanna Gappa” pada abad ke-17 (1667).³⁸

Dengan memperhatikan struktur sumber daya ekonomi lingkungan yang menjadi basis kelangsungan hidup dan sebagai satuan sosial, masyarakat pesisir seperti di Pelabuhan Paotere memiliki identitas kebudayaan yang berbeda dengan satuan-satuan sosial lainnya, seperti petani di dataran rendah, peladang di lahan kering dan dataran tinggi, kelompok masyarakat disekitar hutan dan satuan sosial lainnya yang hidup di daerah perkotaan.³⁹

Sebagai upaya memahami masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan yang bermukim dan melakukan aktivitas di wilayah Pelabuhan Paotere, terdapat beberapa aspek antropoligis yang dipandang penting sebagai pembangun identitas nilai budaya masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere.

Sikatutui, diartikan sebagai mewaspadaai (hati-hati). Pada masyarakat maritim norma seperti ini dipahami dan berfungsi dalam memanfaatkan potensi laut sesuai kebutuhannya baik untuk kepentingan sesaat, maupun untuk kepentingan masa yang akan datang.⁴⁰

A’bulo Sibatang, diartikan sebagai semangat bersatu. Nilai ini dipahami sebagai terwujudnya interkoneksi antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Masyarakat nelayan di Pelabuhan Poetere memiliki kecenderungan dalam konsep nilai ini pada model struktur sosialnya terutama

³⁸ Mattulada dalam M. Syaiful. Jurnal “*Interaksi Sosial dan Reproduksi Nilai Budaya Masyarakat Nelayan di Pelabuhan Paotere Kota Makassar*”. (Makassar: UIN Alauddin Makassar). Hlm.44.

³⁹ *Ibid.* Hlm. 51.

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 52.

relevansinya pada relasi gender. Menurut salah satu informan, semakin berkembangnya pasar dan wilayah Pelabuhan Paotere, semakin banyak perempuan yang beraktivitas di tempat tersebut sebagai pedagang barang rumah tangga maupun penjual ikan. Meski dalam kondisi tersebut, mereka tetap tidak melupakan peran seorang istri.⁴¹

Selain nilai di atas, nilai lain yang mengemuka dalam budaya masyarakat nelayan Makassar adalah *Sipakatau* (saling menghargai, mempercayai). Saling mempercayai merupakan modal sosial utama untuk kemudian bereproduksi ke dalam pranata ekonomi. Kita ambil fakta di lapangan dengan mengamati aktivitas Pelelangan Ikan. Beberapa nelayan yang menjual ikannya di wilayah Pelabuhan Paotere tidak sedikit yang mempercayakan hasil tangkapannya kepada *pa'cato* atau broker yang memiliki keterampilan dalam melelang ikan.⁴²

Kelompok sosial masyarakat Makassar dibedakan berdasarkan garis keturunan, pekerjaan, umur, dan ideologi. Kelompok sosial yang berdasarkan garis keturunan biasa juga disebut stratifikasi sosial. Dalam masyarakat Makassar dikenal ada tiga macam stratifikasi sosial, yaitu golongan *karaeng* 'Bangsawan', golongan *tumaradekaya* 'menengah', dan golongan *ata* 'hamba atau abdi'. Golongan bangsawan terbagi lagi kedalam beberapa kelompok. Kelompok-kelompok tersebut adalah:

1. Kelompok bangsawan yang termasuk anak *tikno*, yaitu keturunan asli raja (bangsawan murni). Keturunan asli raja terbagi lagi kedalam: (a) *Anak*

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 53.

⁴² *Ibid.* Hlm. 54.

Pattola, yaitu anak raja yang dapat langsung menjadi putera mahkota; (b)

Anak manrapik, yaitu putera raja yang mempunyai kesempatan menjadi raja apabila tidak ada putera mahkota.

2. Kelompok bangsawan yang termasuk *anak sipue*, yaitu keturunan raja yang kemungkinan ibunya dari golongan *tumaradeka* atau *ata*.
3. Kelompok bangsawan yang termasuk *anak cerak*, yaitu keturunan bangsawan darah. Yang termasuk kelompok ini adalah *anak tikno* atau *anak sipue* yang kawin dengan golongan *ata*;
4. Kelompok bangsawan yang termasuk *anak karaeng sala* atau bangsawan tidak matang. Yang termasuk kelompok ini adalah hasil perkawinan antara *anak sipue* atau *anak cerak* dengan *tumaradeka* atau *ata*.⁴³

Golongan kedua adalah *tumaradeka* meliputi orang-orang kaya atau orang terpandang dalam masyarakat biasa disebut *tubajik* dan orang-orang biasa yang disebut *tusamarak*. Populasi *tusamarak* inilah yang terbanyak dalam masyarakat.⁴⁴

2.3 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Makassar

Sebagai kota yang terletak di kawasan pesisir, Kota Makassar memiliki sumberdaya perikanan dan biota laut lain yang bernilai ekonomis membuat sebagian besar masyarakat di pesisir Kota Makassar bermata pencaharian sebagai nelayan dengan menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Penduduk pesisir Kota Makassar sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Berdasarkan laporan Triwulan

⁴³ Tadjuddin Maknun, 2012. "*Nelayan Makassar Kepercayaan, Karakter*". Identitas Universitas Hasanuddin: Makassar. Hlm. 22-23.

⁴⁴ *Ibid.*

III Perikanan Laut Kota Makassar pada tahun 1966, jumlah nelayan tiap Kecamatan dipesisir Kota Makassar yaitu Kecamatan Tallo 792 orang, Kecamatan Ujung Tanah 343 orang dan Kecamatan Mariso/Makassar 1.233 orang.⁴⁵

Dengan sumber daya laut yang potensial terutama dalam sektor perikanan, Pemerintah memanfaatkan sumber daya laut yang dimiliki Kota Makassar dengan memberi fasilitas kepada masyarakat di Pesisir Kota Makassar, salah satunya dengan membangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai pusat terjadinya transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan. Selain itu, perikanan memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pemungutan Retribusi. Seperti yang telah diketahui bahwa sumber penunjang utama pendapatan rutin baik tingkat 1 maupun tingkat 2 adalah dari perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah berupa subsidi gaji, yang merupakan sumber utama adalah pendapatan dari daerah itu sendiri berupa pajak-pajak, retribusi dan penghasilan lainnya.⁴⁶

Berdasarkan Peraturan Surat Keputusan No.118/IV/1968, memutuskan mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Makassar pada tanggal 4 November 1965 NO.39/DPRD-GR/1965 tentang pendirian Perusahaan Daerah Perikanan atau yang di singkat P.D Perikanan. Dalam peraturan tersebut juga ditetapkan bahwa Perusahaan Pelelangan Ikan Kotamadya Makassar dileburkan dalam Perusahaan

⁴⁵ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988) Volume 1*. No. Reg. 1179, Laporan Triwulan III Perikanan Laut Kotamdy Makassar pada tanggal 4 Agustus 1966.

⁴⁶ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988) Volume 1*. No. Reg.577 tentang pendapatan rutin Daerah.

Daerah Perikanan dan segala hal yang menyangkut Pelelangan Ikan Kotamadya Makassar diambil alih oleh Perusahaan Daerah Perikanan.⁴⁷ Seperti yang diketahui, pada tahun 1966 telah berjalan beberapa Perusahaan Daerah seperti Perusahaan Badan Daerah (Perbada), Perikanan, Kehewanan, Apotik dan Farmasi Ujung Pandang, Pabrik Kaos Nusa Utama dan Pabrik Lemon dan Sirup Mexico.⁴⁸

Tempat Pelelangan Ikan merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha serta kesejahteraan nelayan, tujuan didirikannya tempat pelelangan ikan adalah untuk membantu memasarkan hasil tangkapan ikan secara cepat untuk menjaga kualitas ikan, serta melindungi nelayan dari permainan harga dari tengkulak, membantu nelayan mendapatkan harga ikan yang layak.⁴⁹

Di Kota Makassar, pada tahun 1950-an hanya terdapat dua Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Makassar yaitu Pelelangan Ikan Kampung Gusung (Paotere) dan Pelelangan Ikan Kampung Baru. Tempat Pelelangan Ikan Paotere terletak di Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Kelurahan Gusung terletak di pesisir yang memiliki potensi sumber daya laut sebagai sumber

⁴⁷ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988) Volume 1*. No. Reg. 1179, tentang pendirian perusahaan daerah "Perikanan" Kotamadya Makassar.

⁴⁸ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988) Volume 1*. No. Reg. 576, perihal laporan tahunan untuk tahun 1967 dan rencana kerja untuk tahun 1968 Pemerintah Daerah Kotamadya Makassar dikemukakan oleh Walikota Kepala Daerah Makassar, Major M. Daeng Patompo dalam sidang Paripurna DPRD Kotamadya Makassar tgl 23 Januari 1968.

⁴⁹ Yursita Sahae Sadadang, dkk. "Manajemen Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Tumumpa Dua Kota Manado". Jurnal (Manado: Universitas Sam Ratulangi). Hlm. 18.

kehidupan masyarakatnya. Pelelangan Ikan Paotere memiliki Kepala Pelelangan yang bernama Mahmud. Sebagai salah satu pelelangan di Sulawesi Selatan, terdapat organisasi lembaga ekonomi nelayan yang dikenal dengan *Ponggawa - Sawi*, yang merupakan lembaga ekonomi tradisional orang Bugis Makassar yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan hingga saat ini masih dipertahankan.⁵⁰

Tempat Pelelangan Ikan Kampung Baru terletak di Kampung Baru atau dalam Bahasa Makassar disebut dengan Kampong Beru terletak di bagian Selatan Benteng Rotterdam, berada di dekat pantai. Pada tahun 1954, Pelelangan Ikan Kampung Baru memiliki Kepala Pelelangan yang bernama I.M Pabe. Di daerah ini berdiam orang-orang dari Asia serta para bekas budak beragama Kristen yang bekerja sama dengan Belanda.⁵¹

Sama halnya dengan Tempat Pelelangan Ikan Paotere, kekacauan juga sering terjadi di Pelelangan Kampung Baru. Pada tahun 1952, telah terjadi kekacauan di Pelelangan Ikan Kampung Baru yang dilakukan oleh anak-anak pasar yang menginap di pelelangan. Mereka mengganggu nelayan-nelayan yang datang membawa ikan dan mencuri ikan-ikan yang disimpan di Pelelangan.⁵² Selain itu, terjadi pelanggaran-pelanggaran di pelelangan dimana banyak pembeli yang membawa pergi ikan sebelum membayar harga ikan dan ikan yang dimasukkan ke

⁵⁰ Raodah, "Ponggawa-Sawi Lembaga Ekonomi Nelayan Tradisional Makassar", (Makassar: De La Macca ,2004). Hlm. 3.

⁵¹ Iswadi "Benteng Ujung Pandang Cikal Bakal Kota Makassar (Sebuah Kajian Lanskap Konflik, Sosial Budaya dan Alam)". Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Provinsi Sulawesi Selatan. Hlm. 76.

⁵²Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988) Volume 1*. No. Reg. 232, Perihal anak-anak pasar yang menginap di pelelangan dan mengadakan kekacauan.

Kota Makassar di jual langsung oleh nelayan atau Punggawa kepada Pakulontong atau pembeli tanpa melalui pelelangan ikan.⁵³

Tabel 2.4 Daftar Harga dan Jenis Ikan yang Masuk di Pelelangan Ikan Kampung Baru Kota Makassar pada tanggal 1 s/d 15 November 1960

Ta ng ga l	Hasil Empang				Hasil laut				Jumlah		Harga rata- rata per kg
	Bandeng		Udang		Rappo- rappo/Sinrilik		Campuran		Kg Harga		
	Kg	Harga	Kg	Har ga	Kg	Harga	Kg	Harga	Kg	harga	
1	400	8.000	100	2.20 0	-	-	1653	19.799, 50	2.14 3	29.99 9,50	14,-
2	300	6.000	-	-	200	1.800	1502	20.236, 50	2.00 2	28.03 6,50	14,-
3	500	10.00 0	-	-	-	-	1516	18.224, 50	2.01 6	28.22 4,50	14,-
4	600	12.00 0	100	2.20 0	-	-	1461	16.058, 50	2.16 1	30,25 8,50	14,-
5	700	14.00 0	-	-	-	-	1465	16.315, -	2.16 5	30.31 5,-	14,-
6	800	16.00 0	-	-	100	900	1.108	11.223, -	2.00 8	28.12 3,-	14,-
7	300	6.000	-	-	200	1.800	1.245	16.641, 50	1.74 5	24.44 1,50	14,-
8	400	8.000	-	-	100	900	1.533	19.571, 50	2.03 3	28.47 1,50	14,-
9	500	10.00 0	-	-	100	900	1.423	17.422, -	2.02 3	28.32 2,-	14,-
10	600	12.00 0	-	-	-	-	1.603	18.852, 50	2.20 3	30.85 2,50	14,-
11	300	6.000	200	4.40 0	100	900	1.471	17.696, 50	2.07 1	28.99 6,50	14,-
12	200	4.000	-	-	-	-	840,-	10.567, 50	1.04 0	14.56 7,50	14,-

⁵³ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988) Volume 1*. No. Reg. 232, Perihal pencurian ikan dan pelanggaran peraturan Pelelangan Ikan.

Ta ng ga l	Hasil Empang				Hasil laut				Jumlah		Harga rata- rata per kg
	Bandeng		Udang		Rappo- rappo/Sinrilik		Campuran		Kg Harga		
	Kg	Harga	Kg	Har ga	Kg	Harga	Kg	Harga	Kg	harga	
13	500	10.00 0	100	2.20 0	100	900	1.456	17.090. -	2.15 6	30.19 0,-	14,-
14	400	8.000	200	4.40 0	100	900	1.365 ,-	15.764, 50	2.06 5	29.06 4,50	14,-
15	700	14.00 0	100	2.20 0	100	900	1.402	15.231, -	2.30 2	32,23 1,-	14,-

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventais Arsip Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988) Volume 1. Nomor Reg. 1178.

Tabel 2.5 Daftar nama Pulau dan Kampung yang memasukkan ikan di Pelelangan Ikan Kampung Baru pada tanggal 1 s/d 30 November 1960

No.	Nama Pulau dan Kampung	Jumlah Ikan (Kg)
1.	Kodingareng	3.950
2.	Barang Caddi	3.080
3.	Barang Lompo	2.970
4.	Pulau Badi	2.605
5.	Kari	2.515
6.	Maros	2.530
7.	Sarape	2.225
8.	Labakang	2.730
9.	Maruna	2.070
10.	Galesong	2.375
11.	Barombong	1.925
12.	Bayang	2.275
13.	Mariso	2.208
14.	Pulau Bone	2.595
15.	Pangkajene	2.520
16.	Takalar	2.150
17.	Parang Tambung	2.350
18.	Barru	2.305
19.	S. Tallu	2.130
20.	Tanete	3.044

21.	Tanakeke	1.757
22.	Segeri	2.482
23.	Palanro	2.129
24.	Tanjung Bunga	2.325
25.	Pulau Takalasi	1.486
26.	Pare-Pare	3.326

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventais Arsip Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988) Volume 1. Nomor Reg. 1178.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa ikan yang lelang di Pelelangan Ikan Kampung Baru tidak hanya berasal dari hasil tangkapan Nelayan sekitar, akan tetapi juga berasal dari beberapa pulau atau daerah lainnya.

Tabel 2.6 Daftar Nama-nama Punggawa Ikan dan Punggawa Klontong di Pelelangan Ikan Kampung Baru

No.	Nama	Alamat	Jumlah orang	Klontong/ pengikut
Punggawa klontong				
1.	Mahmud Dg. Mangung	Jl.H.Berua No.17	4 orang	Klontong
2.	Ranjani	Jl.Maricaya	1 orang	Klontong
3.	Barra	Balang Baru	3 orang	Klontong
4.	Kadir	Bontoala	3 orang	Klontong
Punggawa Ikan				
5.	Nawang	Jl.pasar ikan	3 orang	Pengikut
6.	Suttara Dg. Tarru	Jl.kakaran No.35	1 orang	Pengikut
7.	Dali Dg. Mile	Jl.Galesong II	1 orang	Pengikut
8.	Dg.Mine	Jl.Taman siswa	3 orang	Pengikut
9.	Dg.Tawang	Jl.Dadi	2 orang	Pengikut
10.	Dg.Nuru	Jl.layang	2 orang	Pengikut
11.	Dg.Siama	Jl.kakatua	3 orang	Pengikut
12.	Maji Baso	Jl.Bawakaraeng	2 orang	Pengikut

13.	Maji Dg.Manik Tara	Jl.Haji Beru	2 orang	Pengikut
14.	Talo	Jl. Datu nuntung	1 orang	Pengikut
15.	Nurdin	Jl.Haji Beru No.2	2 orang	Pengikut
16.	Baso Dg.Beta	Jl.Sambung nyawa No.112	2 orang	Pengikut

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventais Arsip Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988) Volume 1. Nomor Reg. 232 perihal Daftar Nama-Nama Punggawa Ikan dan Punggawa Klontong di Pelelangan Ikan Kampung Baru pada tanggal 22 Juli 1954.